



Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Sekolah Untuk Mendukung Kegiatan Osis Pada Sekolah Menengah Di Kabupaten Bulukumba

Nadia ^{1*}, Diyana ², Febriyanti ³, Selmiani Palallo ⁴, A. Miftahul Ummum ⁵

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
nadia29072007@gmail.com

ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntabilitas penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS pada sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba melalui aspek perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi bendahara sekolah, tim BOS/BOSP, penyusun laporan keuangan, dan pembina OSIS pada tiga sekolah, yaitu MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan SMAN 1 Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga sekolah telah menerapkan mekanisme akuntabilitas secara prosedural melalui penyusunan anggaran partisipatif, pelaksanaan berbasis proposal, pencatatan dengan aplikasi digital (SAKTI, ARKAS, SIPLah), dan pelaporan berkala yang diperiksa oleh pihak berwenang. Kendati demikian, terdapat kendala yang bersifat struktural maupun kapasitas, meliputi keterlambatan pencairan dana, revisi anggaran berulang, serta keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan secara substantif karena masih terdapat celah antara pemenuhan prosedur formal dan kualitas pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Penguatan kapasitas perencanaan, konsistensi penggunaan sistem digital, dan pendampingan dalam penyusunan laporan menjadi implikasi utama penelitian ini

Kata Kunci :

Akuntabilitas, Dana Sekolah, OSIS, Pencatatan, Perencanaan

ABSTRACT (In English)

This study aims to analyze the implementation of accountability in the use of school funds to support student organization (OSIS) activities at secondary schools in Bulukumba Regency, covering the aspects of planning, implementation, recording, and reporting. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. Research informants included school treasurers, BOS/BOSP teams, financial report preparers, and OSIS supervisors at three schools: MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, and SMAN 1 Bulukumba. The findings indicate that all three schools have implemented procedural accountability mechanisms through participatory budget planning, proposal-based execution, digital recording systems (SAKTI, ARKAS, SIPLah), and periodic reporting reviewed by authorized parties. However, structural and capacity-related challenges persist, including delays in fund disbursement, repeated budget revisions, and late submission of accountability reports. These findings suggest that accountability has not yet operated in a fully substantive manner, as gaps remain between formal procedural compliance and the actual quality of accountability. Strengthening planning capacity, consistent use of digital systems, and guided report preparation emerge as the key implications of this study.

Keywords :

Accountability, Planning, Recording, School Fund, Student Organization



PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak hanya berperan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, tetapi juga mendukung pengembangan kemampuan organisasi peserta didik melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama, dan keterampilan berorganisasi melalui berbagai program kerja dan kegiatan sekolah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan OSIS memerlukan dukungan dana sekolah agar setiap program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS perlu dikelola secara tertib dan bertanggung jawab agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengelolaan dana sekolah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan sekolah (Kramer & Wibowo, 2024). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana sekolah harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam penggunaan dana sekolah karena setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018:27), akuntabilitas merupakan kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan Mahmudi (2016:19) menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana sekolah diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi kepada pihak terkait sebagai bentuk transparansi (Ramdhani, 2022). Innanawati et al. (2024) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana sekolah dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Selain itu, Pradana et al. (2025) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pendidikan. Namun demikian, Candri et al. (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan dalam proses realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Berdasarkan hasil observasi awal pada beberapa sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba, penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, pembina OSIS, komite sekolah, dan pengurus OSIS. Pengelolaan dana juga didukung oleh penggunaan sistem digital seperti SAKTI, ARKAS, dan SIPLah untuk membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih tertib serta mendukung pengawasan penggunaan dana. Selain itu, setiap penggunaan dana kegiatan telah disertai bukti transaksi, rekonsiliasi laporan keuangan, dan pengawasan dari pihak internal maupun eksternal sekolah sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas penggunaan dana kegiatan OSIS. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, perubahan kebutuhan kegiatan yang menyebabkan revisi anggaran, serta keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu, perbedaan mekanisme pengelolaan dan pengawasan pada masing-masing sekolah menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas penggunaan dana kegiatan OSIS masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana sekolah secara umum dan belum secara khusus mengkaji akuntabilitas penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS, terutama yang meninjau proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan penggunaan dana kegiatan siswa pada beberapa sekolah menengah. Penelitian mengenai penerapan akuntabilitas penggunaan dana kegiatan OSIS yang dikaitkan dengan penggunaan sistem digital dan mekanisme pengawasan pengelolaan dana juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada penerapan akuntabilitas penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan pada beberapa sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba serta meninjau penggunaan sistem digital dan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan dana kegiatan OSIS. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam penggunaan dana sekolah untuk mendukung kegiatan OSIS melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan pada sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba.



LANDASAN TEORITIS

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik. Mardiasmo (2018:27) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara konseptual, akuntabilitas dibedakan menjadi akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mahmudi (2016:19) memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam konteks dana pendidikan sebagai dana publik, kedua dimensi akuntabilitas tersebut menjadi penting: penggunaan dana tidak hanya harus sesuai regulasi (akuntabilitas vertikal), tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat (akuntabilitas horizontal).

Pengelolaan Dana Sekolah dan Kegiatan OSIS

Dana sekolah merupakan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Pengelolaan dana sekolah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan sistem keuangan (Kramer & Wibowo, 2024). Penggunaan dana BOS sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan sekolah wajib mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah.

OSIS sebagai organisasi resmi kesiswaan memerlukan dukungan pendanaan yang dialokasikan dalam perencanaan sekolah. Pelaksanaan program kerja OSIS melibatkan pengurus OSIS, pembina, dan pihak sekolah dalam penyusunan proposal, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban kegiatan (Maryanah et al., 2022). Karena dana yang digunakan bersumber dari dana sekolah, penggunaannya harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mencakup kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan (Septiyani & Rumefti, 2024).

Indikator Akuntabilitas

Penelitian ini menggunakan empat indikator akuntabilitas berdasarkan Mahmudi (2016:19): (1) Perencanaan, yaitu penyusunan program kerja dan anggaran kegiatan OSIS yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan regulasi yang berlaku; (2) Pelaksanaan, yaitu kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan dana; (3) Pencatatan, yaitu kelengkapan bukti transaksi dan tertib administrasi keuangan; serta (4) Pelaporan, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi kepada pihak terkait.

Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, transparansi, dan pengawasan. Dalam konteks Indonesia, Ramdhani (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 5 Ciamis telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaan dana. Meskipun demikian, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam pemanfaatan media digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Candri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam realisasi anggaran dana BOS pada sekolah dasar di Bengkalis masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari adanya ketidaksesuaian dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Persoalan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah juga menjadi perhatian dalam penelitian di berbagai negara. Dwangu & Mahlangu (2021) menemukan bahwa penerapan mekanisme akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan kepala sekolah di Afrika Selatan belum sepenuhnya efektif. Mekanisme yang tersedia belum secara konsisten mampu menjamin pengelolaan keuangan yang efisien dan mencegah terjadinya kelemahan dalam praktik pengelolaan dana. Sementara itu, Tshwane & Bussin (2022) mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam pengelolaan risiko keuangan pada sekolah di Tshwane, Afrika Selatan, yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab, praktik pencatatan keuangan, pelaporan, monitoring, dan dukungan dari otoritas pendidikan. Kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa

keberadaan aturan dan prosedur formal belum cukup untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel apabila tidak disertai pembagian tugas yang jelas, pencatatan yang memadai, pelaporan yang konsisten, serta pengawasan yang efektif.

Perspektif yang berbeda ditunjukkan oleh Matete (2022) melalui penelitian mengenai desentralisasi pendidikan di Tanzania. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah yang terdiri atas unsur masyarakat dan orang tua dapat berkontribusi terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya menjamin pengawasan yang menyeluruh karena perhatian terhadap aspek keuangan tidak selalu diikuti dengan pengawasan terhadap aspek pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana perlu didukung oleh kapasitas dan mekanisme pengawasan yang memadai agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas. Selanjutnya, Maama et al. (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap praktik pelaporan keuangan pada sekolah negeri di KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penguatan praktik pelaporan keuangan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana sekolah.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan telah memberikan perhatian terhadap aspek transparansi, kepatuhan pelaporan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan sekolah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan dana pendidikan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan sekolah secara keseluruhan, terutama dana BOS. Kajian yang secara spesifik menelaah penggunaan dana sekolah untuk mendukung kegiatan organisasi siswa, khususnya OSIS, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak membandingkan praktik pengelolaan dana kegiatan siswa pada jenis sekolah yang berbeda dengan menelusuri keseluruhan tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk memahami bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan pada pengelolaan dana kegiatan OSIS yang melibatkan siswa sebagai pelaksana kegiatan serta pembina, bendahara, dan pihak sekolah sebagai pihak yang memiliki fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan akuntabilitas penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS pada tiga sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba. Analisis dilakukan secara komparatif dengan menelaah empat tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan OSIS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus ganda atau *multiple case study*. Rancangan tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi akuntabilitas pengelolaan dana sekolah dalam menunjang kegiatan OSIS sesuai realita di lapangan. Penerapan studi kasus ganda dimaksudkan untuk melakukan perbandingan pola dan praktik akuntabilitas pada sekolah-sekolah dengan karakteristik yang berlainan. Penelitian dilaksanakan di tiga sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba, yakni MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan SMAN 1 Bulukumba. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa ketiga sekolah tersebut merepresentasikan madrasah, SMK, dan SMA, serta memiliki sistem pengelolaan dana OSIS yang berjalan aktif dan mampu menyediakan data yang memadai bagi penelitian.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling, yaitu individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dana untuk kegiatan OSIS, termasuk bendahara sekolah, tim BOS/BOSP, penyusun laporan keuangan, dan pembina OSIS. Terdapat enam orang yang menjadi informan, yang terdiri dari satu orang informan dari MAN 2 Bulukumba, tiga orang informan dari SMAN 1 Bulukumba, dan dua orang informan dari SMKN 1 Bulukumba. Mereka dipilih karena memiliki wawasan dan pengalaman konkret terkait proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan dana untuk kegiatan OSIS..

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi tentang proses pengelolaan dana kegiatan OSIS. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi pelaksanaan dan pengelolaan dana di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen seperti proposal kegiatan, laporan

pertanggungjawaban, dan bukti transaksi. Proses analisis data penelitian ini mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung dalam tiga tahapan saling berhubungan. Tahap pertama adalah reduksi data dan pengkodean (*data reduction and coding*), di mana peneliti wawancara bersama bendahara, tim BOS/BOSP, penyusun laporan keuangan, dan pembina OSIS, disandingkan dengan catatan lapangan serta dokumen pendukung seperti proposal, bukti transaksi, dan LPJ. Melalui *initial coding*, unit data disintesis menjadi empat tema utama: perencanaan (bersumber dari rapat dan penyusunan anggaran), pelaksanaan (mengenai alur proposal dan pencairan dana), pencatatan (mengenai pembukuan dan validitas transaksi), serta pelaporan (mengenai penyusunan dan penyerahan LPJ). Tahap kedua, yakni penyajian data (*data display*), mengomparasikan temuan tematik tersebut dalam bentuk narasi analitis dan matriks komparatif untuk membedah praktik akuntabilitas di MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan SMAN 1 Bulukumba. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), di mana pemaknaan data dilakukan secara bertahap serta diuji tingkat keabsahannya menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah menengah di Kabupaten Bulukumba, yaitu MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan SMAN 1 Bulukumba. Ketiga sekolah ini dipilih secara purposif karena masing-masing mewakili jenis sekolah yang berbeda, yaitu madrasah negeri di bawah Kementerian Agama, sekolah kejuruan, dan sekolah menengah atas negeri, sehingga memungkinkan perbandingan pengelolaan dana yang lebih kaya dan komprehensif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan bendahara, penyusun laporan keuangan, dan tim BOS/BOSP, serta diperkuat dengan observasi dan telaah dokumentasi.

Secara umum, pengelolaan dana kegiatan OSIS di ketiga sekolah mengikuti alur yang sama: perencanaan melalui rapat partisipatif, pelaksanaan berbasis proposal, pencatatan menggunakan sistem digital, dan pelaporan berkala kepada pihak berwenang. Namun, terdapat perbedaan mekanisme, instrumen, dan intensitas pengawasan yang cukup signifikan antar sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas akuntabilitas masing-masing institusi.

Perencanaan Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Perencanaan penggunaan dana kegiatan OSIS di ketiga sekolah dilaksanakan melalui rapat bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di MAN 2 Bulukumba, rapat perencanaan melibatkan kepala madrasah, guru, staf, komite sekolah, dan pengurus OSIS. Program kerja yang diusulkan pengurus OSIS pada umumnya disetujui, namun selanjutnya disesuaikan dengan rencana kinerja madrasah yang akan diajukan ke Kementerian Agama. Seluruh alokasi dana harus mengikuti aturan penggunaan dana BOS yang berlaku. Kondisi tersebut terlihat dari keterangan informan bahwa, “Sebagian besar usulan kegiatan dari pengurus OSIS biasanya disetujui, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perubahan dan revisi anggaran sesuai dengan kondisi kegiatan serta kebutuhan di lapangan. Revisi anggaran dilakukan apabila terdapat penyesuaian biaya atau kebutuhan tambahan selama kegiatan berlangsung.”

Di SMKN 1 Bulukumba, dasar penyusunan anggaran adalah laporan pendidikan sekolah yang mencerminkan kondisi riil lembaga. Pihak yang dilibatkan lebih luas, mencakup tim BOS, kepala sekolah, guru, pembina kegiatan, komite sekolah, hingga perwakilan masyarakat dan orang tua siswa. Keterlibatan tersebut tercermin dalam pernyataan informan:

“Pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran meliputi tim BOS, kepala sekolah, guru, pembina kegiatan, komite sekolah, serta perwakilan masyarakat atau orang tua siswa.”

Setiap organisasi kesiswaan, termasuk OSIS, Pramuka, dan PMR, telah memiliki alokasi anggaran tersendiri berdasarkan proposal kegiatan yang diajukan sejak awal tahun. Namun, keberadaan alokasi tersebut tidak berarti seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Sekolah tetap melakukan penilaian berdasarkan kebutuhan, prioritas program, visi sekolah, dan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis BOS. Sebagaimana disampaikan informan, bahwasanya “Tidak semua usulan kegiatan langsung disetujui karena sekolah harus mempertimbangkan apakah kegiatan tersebut benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.”

Sementara itu, di SMAN 1 Bulukumba, rapat perencanaan melibatkan pengurus OSIS, bendahara, pembina OSIS, pihak sekolah, komite, guru, dan perwakilan siswa. Anggaran kegiatan disusun berdasarkan

kebutuhan program kerja yang diajukan melalui proposal, kemudian diperiksa dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Informan menggambarkan proses tersebut sebagai berikut:

“Anggaran kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan program kerja yang diajukan melalui proposal, kemudian diperiksa dan disesuaikan dengan dana yang tersedia.”

Ketiga sekolah memanfaatkan aplikasi digital yang berbeda: MAN 2 Bulukumba menggunakan SAKTI, SMKN 1 Bulukumba menggunakan ARKAS yang terhubung langsung dengan sistem pemerintah, dan SMAN 1 Bulukumba menggunakan SIPLah. Di MAN 2 Bulukumba dan SMKN 1 Bulukumba, revisi anggaran kerap terjadi selama kegiatan berlangsung, dipicu oleh perubahan kebutuhan mendadak, kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya terantisipasi, atau adanya kegiatan tambahan yang dianggap mendesak.

Tabel 1. Ringkasan Komparatif Perencanaan Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Aspek	MAN 2 Bulukumba	SMKN 1 Bulukumba	SMAN 1 Bulukumba
Pihak yang terlibat	Kepala madrasah, guru, staf, komite, dan OSIS	Kepala sekolah, tim BOS, guru, pembina, komite, masyarakat, dan orang tua	OSIS, bendahara, pembina, pihak sekolah, komite, guru, dan perwakilan siswa
Dasar Perencanaan	Program kerja OSIS dan rencana kinerja madrasah	Laporan pendidikan, prioritas kebutuhan, visi sekolah, danjuknis BOS	Kebutuhan program kerja dan proposal kegiatan
Mekanisme	Rapat dan penyesuaian dengan rencana kinerja serta ketentuan BOS	Proposal diseleksi berdasarkan prioritas, visi sekolah, danjuknis BOS	Proposal diperiksa dan disesuaikan dengan dana tersedia
Sistem Digital	SAKTI	ARKAS	SIPLah
Perubahan Anggaran	Terjadi selama kegiatan karena kebutuhan mendadak/kegiatan tambahan	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data

Pelaksanaan Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Pada tahap pelaksanaan, ketiga sekolah menerapkan mekanisme pengajuan proposal sebagai prasyarat sebelum dana dapat dicairkan. Di MAN 2 Bulukumba, setiap pembina atau penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan proposal yang kemudian dibahas dalam rapat pimpinan madrasah untuk memperoleh persetujuan. Setiap kegiatan juga memiliki panitia dan penanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dananya memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Mekanisme tersebut tergambar dalam keterangan informan:

“Setiap pembina atau penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan proposal yang kemudian dibahas dalam rapat pimpinan madrasah untuk memperoleh persetujuan.”

Dalam pelaksanaannya, keterbatasan dana masih menjadi salah satu kendala karena tidak seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipenuhi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persetujuan terhadap suatu program tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan sekolah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaannya.

Di SMKN 1 Bulukumba, pencairan dana dilakukan berdasarkan program yang telah direncanakan. Salah satu persoalan yang muncul adalah keterlambatan pencairan dana. Untuk menjaga agar kegiatan tetap dapat berjalan, sekolah menggunakan mekanisme talangan dengan memanfaatkan dana sementara dari unit produksi sekolah atau toko rekanan. Dana tersebut kemudian dikembalikan setelah pencairan resmi diterima. Informan menjelaskan:

“Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah biasanya melakukan pergeseran anggaran atau meminjam dana sementara dari unit produksi sekolah maupun toko rekanan, kemudian diganti setelah dana resmi cair.”

Selain mekanisme tersebut, pengawasan pelaksanaan dilakukan melalui pemeriksaan laporan, audit, dan rekonsiliasi secara berkala. Kepala sekolah menjadi salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan, sementara komite dan masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan dana tidak hanya berorientasi pada terselenggaranya kegiatan, tetapi juga pada pengendalian penggunaan dana selama kegiatan berlangsung.

Berbeda dengan kedua sekolah tersebut, SMAN 1 Bulukumba memberikan ruang yang lebih besar kepada pengurus OSIS dalam pengelolaan dana kegiatan. Pengurus OSIS diberikan kewenangan untuk

mengelola anggaran secara mandiri, sedangkan pembina tidak memegang dana secara langsung dan lebih berperan sebagai pengarah serta pengawas. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa, “Pengurus OSIS diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran kegiatan secara mandiri. Pembina OSIS tidak memegang dana secara langsung, tetapi berperan sebagai pengarah dan pengawas.”

Pola tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana. Jika MAN 2 Bulukumba dan SMKN 1 Bulukumba lebih menekankan mekanisme pengendalian administratif, SMAN 1 Bulukumba memberikan penekanan lebih besar pada keterlibatan dan kemandirian siswa dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan.

Tabel 2. Ringkasan Komparatif Pelaksanaan Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Aspek	MAN 2 Bulukumba	SMKN 1 Bulukumba	SMAN 1 Bulukumba
Mekanisme Pencairan	Proposal diajukan dan disetujui pimpinan madrasah	Berdasarkan program kegiatan yang telah direncanakan	Pengelolaan anggaran dilakukan oleh pengurus OSIS
Pengelolaan Kegiatan	Panitia dan penanggung jawab kegiatan	Pengelola sesuai program kegiatan	Pengurus Osis
Peran Pembina/ Pimpinan	Persetujuan pimpinan madrasah	Kepala sekolah sebagai otoritas pemeriksa	Pembina sebagai pengarah dan pengawas
Pengawasan	Pimpinan madrasah dan pihak terkait	Audit, pemeriksaan laporan, rekonsiliasi, komite, dan masyarakat	Pembina OSIS dan pihak sekolah
Kendala	Keterbatasan dana	Keterlambatan pencairan dana	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data

Pencatatan Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Pencatatan penggunaan dana pada ketiga sekolah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap transaksi harus dapat ditelusuri melalui bukti dan dokumen pendukung. Namun, instrumen yang digunakan menunjukkan karakteristik yang berbeda pada masing-masing sekolah. MAN 2 Bulukumba menggunakan aplikasi SAKTI untuk pencatatan digital seluruh transaksi keuangan. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung proses penginputan, pencatatan, dan pelaporan sehingga transaksi dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Informan menjelaskan:

“Pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem digitalisasi keuangan menggunakan aplikasi SAKTI. Aplikasi tersebut digunakan untuk membantu proses pencatatan, penginputan, dan pelaporan keuangan agar lebih tertib dan terkontrol.”

Setiap pengeluaran juga harus disertai bukti transaksi berupa kwitansi atau nota pembelian. Pencatatan dilakukan secara berkala melalui laporan bulanan, triwulanan, rekonsiliasi, hingga laporan semester. Pengelolaan tersebut berada dalam pengawasan Kementerian Agama, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, laporan keuangan yang dihasilkan bersifat internal sehingga tidak dapat diakses secara bebas oleh pihak luar.

SMKN 1 Bulukumba menggunakan instrumen yang lebih konvensional namun komprehensif, yakni Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu pajak, rekening koran, dan dokumen pendukung lainnya. Informan menyampaikan bahwasanya, “Pada tahap pencatatan, seluruh transaksi keuangan dicatat menggunakan Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu pajak, rekening koran, dan dokumen pendukung lainnya.” Setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi dan dokumentasi barang yang dibeli, kemudian dilanjutkan dengan proses serah terima setelah barang diterima. Rekonsiliasi dilakukan setiap tiga bulan dengan mencocokkan uang masuk, uang keluar, BKU, buku pajak, dan rekening koran. Dengan mekanisme tersebut, pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk memeriksa kesesuaian antara catatan keuangan dan kondisi aktual.

Di SMAN 1 Bulukumba, pencatatan penggunaan dana dilakukan oleh bendahara OSIS dengan menggunakan SIPLah dan berada di bawah pengawasan pembina OSIS. Setiap transaksi juga diwajibkan memiliki bukti pendukung. Informan menegaskan: “Setiap transaksi wajib disertai kwitansi dan dokumen pendukung.”

Laporan keuangan selanjutnya diperiksa secara berkala oleh PPK, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, meskipun ketiga sekolah menggunakan instrumen pencatatan yang berbeda, terdapat kesamaan pada prinsip dasarnya, yaitu setiap penggunaan dana harus memiliki bukti transaksi dan dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang tersedia..

Tabel 3. Ringkasan Komparatif Pencatatan Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Aspek	MAN 2 Bulukumba	SMKN 1 Bulukumba	SMAN 1 Bulukumba
Sistem/ Instrumen Pencatatan	SAKTI	BKU, buku pembantu pajak, rekening koran, dan dokumen pendukung	SIPLah
Bukti Transaksi	Kwitansi atau nota pembelian	Bukti transaksi dan dokumentasi barang	Kwitansi dan dokumen pendukung
Rekonsiliasi/ Pemeriksaan Pengawasan	Bulanan, triwulan, dan semester Kementerian Agama, Inspektorat, dan BPK	Setiap tiga bulan Kepala sekolah dan pihak terkait	Pemeriksaan secara berkala PPK, Inspektorat, dan Dinas Pendidikan
Akses Informasi	Laporan bersifat internal dan tidak dapat diakses bebas pihak luar	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir yang menunjukkan bagaimana penggunaan dana kegiatan OSIS dapat ditelusuri dan diperiksa. Pada ketiga sekolah, laporan pertanggungjawaban pada dasarnya memuat rincian pengeluaran, bukti transaksi, dan dokumentasi kegiatan. Perbedaannya terlihat pada mekanisme pemeriksaan, pembagian tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian laporan. Di MAN 2 Bulukumba, laporan disusun oleh bendahara dan panitia kegiatan, lalu diperiksa oleh kepala madrasah dan pihak terkait. Di MAN 2 Bulukumba, laporan disusun oleh bendahara bersama panitia kegiatan dan selanjutnya diperiksa oleh kepala madrasah serta pihak terkait. Isi laporan tidak hanya mencakup rincian pengeluaran, tetapi juga daftar kebutuhan kegiatan, bukti transaksi, dan dokumentasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan informan:

“Laporan tersebut memuat rincian pengeluaran, daftar kebutuhan kegiatan, bukti transaksi, serta dokumentasi kegiatan. Penyusunan laporan dilakukan oleh bendahara dan panitia kegiatan, kemudian diperiksa oleh kepala madrasah dan pihak terkait lainnya.”

Apabila ditemukan kekurangan data atau kesalahan pencatatan, laporan dapat diperbaiki sebelum diselesaikan. Di sisi lain, tekanan terhadap tenggat penutupan buku laporan menjadi salah satu kendala karena penyelesaian administrasi harus dilakukan tepat waktu.

Di SMKN 1 Bulukumba, laporan pertanggungjawaban diperiksa melalui rekonsiliasi setiap tiga bulan. Transparansi pelaporan juga dilakukan melalui musyawarah atau forum evaluasi kegiatan, sehingga pihak sekolah dan pengurus organisasi dapat mengetahui hasil penggunaan dana secara langsung. Informan menyatakan bahwasanya, “Laporan selalu diperiksa dan dicocokkan secara berkala agar sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.” Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dan pencocokan antara catatan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Sementara itu, SMAN 1 Bulukumba menerapkan pembagian tanggung jawab yang lebih spesifik dalam proses pelaporan. Bendahara bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, sedangkan pembina OSIS memeriksa kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pembagian tersebut dijelaskan oleh informan bahwa, “Bendahara bertanggung jawab atas laporan keuangan, sementara pembina OSIS memeriksa kesesuaian program kerja yang telah dilaksanakan.”

Meskipun pembagian tugas telah dilakukan, penyelesaian laporan pertanggungjawaban masih menghadapi kendala berupa keterlambatan. Kondisi tersebut berkaitan dengan padatnya kegiatan siswa dan banyaknya program yang berlangsung secara berurutan. Dengan demikian, ketiga sekolah telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban, tetapi menghadapi tantangan yang berbeda dalam penerapannya..

Tabel 4. Ringkasan Komparatif Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kegiatan OSIS

Aspek	MAN 2 Bulukumba	SMKN 1 Bulukumba	SMAN 1 Bulukumba
Penyusunan Laporan	Bendahara dan panitia kegiatan	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data	Bendahara Osis
Isi Pertanggung jawaban	Rincian pengeluaran, bukti transaksi, dan dokumentasi kegiatan	Laporan dan hasil rekonsiliasi keuangan	Laporan keuangan dan kesesuaian program kerja
Pemeriksaan	Kepala madrasah dan pihak terkait	Rekonsiliasi dan pemeriksaan setiap tiga bulan	Bendahara dan pembina OSIS
Transparansi/ Evaluasi	Pemeriksaan oleh pihak terkait	Audit, pemeriksaan Musyawarah/forum evaluasi kegiatan	Pemeriksaan oleh pembina OSIS
Kendala	Revisi laporan dan tekanan tenggat penutupan buku	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam data	Keterlambatan LPJ karena padatnya kegiatan

Pembahasan

Analisis Akuntabilitas Berdasarkan Teori Mahmudi dan Mardiasmo

Mengacu pada kerangka Mahmudi (2016:19), akuntabilitas pengelolaan keuangan mencakup empat dimensi yang saling berkaitan: perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan. Apabila keempat dimensi ini diuji terhadap temuan lapangan di ketiga sekolah, gambaran yang muncul adalah akuntabilitas yang sudah berjalan secara prosedural, namun belum sepenuhnya substantif pada semua aspek.

Pada dimensi perencanaan, ketiga sekolah telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam membangun proses yang partisipatif. Pelibatan komite sekolah, perwakilan masyarakat, dan pengurus OSIS dalam rapat perencanaan mencerminkan apa yang oleh Mardiasmo (2018:27) disebut sebagai akuntabilitas demokratis, yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya ke atas secara vertikal, tetapi juga ke samping dan ke bawah secara horizontal. Di SMKN 1 Bulukumba, pelibatan orang tua siswa sebagai pihak eksternal bahkan merupakan praktik yang melampaui kewajiban minimum, karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pengawasan yang aktif. Namun, frekuensi revisi anggaran yang cukup tinggi di MAN 2 Bulukumba dan SMKN 1 Bulukumba mengindikasikan bahwa kualitas analisis kebutuhan pada tahap perencanaan masih perlu diperkuat. Revisi yang tidak direncanakan bukan sekadar persoalan teknis; ia mencerminkan keterbatasan kemampuan proyeksi kebutuhan yang pada akhirnya menggerus kepastian antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan.

Pada dimensi pelaksanaan, penggunaan mekanisme proposal sebelum pencairan dana merupakan instrumen akuntabilitas yang tepat karena memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar pertimbangan yang terdokumentasi. Namun, keterlambatan pencairan dana di SMKN 1 Bulukumba membuka celah yang perlu dicermati. Ketika dana tidak tersedia tepat waktu, sekolah terpaksa menggunakan mekanisme talangan. Secara pragmatis, solusi ini efektif menjaga keberlangsungan kegiatan. Namun dari perspektif akuntabilitas, talangan yang tidak dicatat dan dilaporkan dengan tepat akan menciptakan ketidaksesuaian antara dokumen anggaran dan realisasi di lapangan, sebuah kondisi yang bertentangan dengan prinsip tertib administrasi yang ditekankan oleh Mahmudi (2016). Sementara itu, pendelegasian pengelolaan langsung kepada pengurus OSIS di SMAN 1 Bulukumba memiliki nilai pendidikan yang tinggi, namun juga mengandung risiko karena siswa belum memiliki kompetensi teknis keuangan yang memadai, sehingga pengawasan pembina perlu dilakukan secara ketat dan terstruktur.

Pada dimensi pencatatan, penggunaan aplikasi digital di ketiga sekolah merupakan kemajuan nyata dalam mendukung tertib administrasi. Digitalisasi keuangan memungkinkan pemantauan yang lebih sistematis, mengurangi risiko manipulasi data, dan mempermudah proses audit. Rekonsiliasi berkala setiap tiga bulan di SMKN 1 Bulukumba merupakan praktik yang patut dicontoh karena secara aktif mencegah akumulasi kesalahan pencatatan. Akan tetapi, laporan keuangan yang bersifat internal dan tidak dapat diakses publik secara bebas di MAN 2 Bulukumba perlu mendapat perhatian serius. Mardiasmo (2018) secara eksplisit menekankan bahwa akuntabilitas horizontal menghendaki informasi keuangan dapat diakses oleh pemangku

kepentingan, termasuk masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas ini, meskipun mungkin didasarkan pada pertimbangan keamanan data, berpotensi melemahkan dimensi transparansi yang menjadi fondasi akuntabilitas publik.

Pada dimensi pelaporan, temuan paling kritis adalah keterlambatan laporan pertanggungjawaban di SMAN 1 Bulukumba akibat padatnya kegiatan siswa. Ini bukan sekadar masalah manajemen waktu, melainkan persoalan desain sistem yang lebih mendasar. Ketika tanggung jawab pelaporan dibebankan kepada siswa tanpa mekanisme pendampingan yang memadai, risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan menjadi melekat dalam sistem itu sendiri. Mahmudi (2016) menegaskan bahwa pelaporan yang tidak tepat waktu mengurangi nilai akuntabilitas secara keseluruhan, karena informasi yang terlambat tidak dapat digunakan secara efektif sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini memiliki benang merah yang kuat dengan beberapa penelitian terdahulu. Ramdhani (2022) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana sekolah diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi kepada pihak terkait. Hal ini relevan dengan kondisi di SMKN 1 Bulukumba, di mana forum evaluasi kegiatan berfungsi sebagai mekanisme transparansi tambahan yang melampaui sekadar penyerahan laporan formal kepada atasan. Forum semacam ini menciptakan ruang dialog antara pengelola dana dan pengguna anggaran, yang merupakan wujud akuntabilitas yang lebih hidup dan bermakna.

Innanawati et al. (2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana sekolah dilaksanakan melalui proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan temuan di ketiga sekolah yang secara konsisten melibatkan komite sekolah, guru, dan pengurus OSIS dalam rapat perencanaan. Keterlibatan multi-pihak ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme check and balance yang memastikan bahwa alokasi anggaran mempertimbangkan kepentingan yang beragam. Sementara itu, Candri et al. (2024) menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah belum sepenuhnya optimal, khususnya pada tahap realisasi anggaran dan pelaporan. Temuan ini terkonfirmasi dalam penelitian ini melalui dua indikasi: keterlambatan pencairan dana dan penggunaan talangan di SMKN 1 Bulukumba yang berpotensi menciptakan ketidaksesuaian realisasi, serta keterlambatan laporan di SMAN 1 Bulukumba yang mengindikasikan kelemahan pada tahap pelaporan.

Pradana et al. (2025) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pendidikan. Temuan ini memberikan implikasi yang jelas: setiap kelemahan pada salah satu dimensi akuntabilitas, seperti keterlambatan laporan atau kurangnya rekonsiliasi, akan berpengaruh langsung terhadap kualitas keseluruhan pengelolaan dana. Oleh karena itu, perbaikan pada satu dimensi tidak dapat berdiri sendiri; ia harus dilakukan secara sistemik dan berkesinambungan.

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Akuntabilitas

Dari keseluruhan temuan, terdapat tiga kendala utama yang berulang dan perlu dikaji secara kritis, bukan sekadar dicatat sebagai kelemahan. Pertama, keterlambatan pencairan dana. Kendala ini terjadi di SMKN 1 Bulukumba dan berpotensi terjadi di sekolah-sekolah lain yang bergantung pada mekanisme pengiriman dana BOS dari pemerintah pusat. Keterlambatan bukan semata-mata persoalan internal sekolah; ia merupakan manifestasi dari rantai birokrasi distribusi dana yang panjang. Dampaknya berlapis: jadwal kegiatan terganggu, sekolah terpaksa mencari solusi pembiayaan sementara, dan risiko administratif meningkat karena pengeluaran yang didahulukan sebelum dana resmi tersedia harus dicatat dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan temuan dalam audit.

Kedua, revisi anggaran yang tidak selalu terantisipasi. Di MAN 2 Bulukumba dan SMKN 1 Bulukumba, revisi anggaran terjadi cukup sering, menunjukkan adanya jarak antara kapasitas perencanaan dan dinamika kebutuhan di lapangan. Revisi anggaran yang dilakukan secara prosedural, melalui persetujuan pihak berwenang dan dokumentasi yang memadai, sebenarnya merupakan bagian normal dari siklus pengelolaan keuangan. Masalah timbul ketika revisi dilakukan tanpa prosedur yang jelas atau tanpa pencatatan yang memadai, sehingga pada akhir periode sulit untuk merekonstruksi logika pengeluaran dari anggaran awal ke realisasi akhir.

Ketiga, keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Di SMAN 1 Bulukumba, keterlambatan ini mengungkapkan sebuah dilema yang menarik: sistem yang mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada siswa demi tujuan pedagogis harus berhadapan dengan kenyataan bahwa siswa adalah pelaksana kegiatan sekaligus penanggung jawab administrasi keuangan, dua peran yang membutuhkan kapasitas dan waktu yang berbeda. Tanpa pendampingan teknis yang memadai dari pembina atau bendahara

sekolah, kualitas laporan yang dihasilkan berpotensi tidak memenuhi standar akuntabilitas yang dipersyaratkan. Di MAN 2 Bulukumba, tekanan tenggat penutupan buku juga menunjukkan bahwa jadwal pelaporan perlu direncanakan dengan lebih baik agar tidak bertabrakan dengan intensitas kegiatan

Penerapan Akuntabilitas

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi yang perlu diperhatikan oleh pengelola sekolah, pengawas pendidikan, dan pembuat kebijakan. Pertama, akuntabilitas prosedural harus disertai dengan akuntabilitas substantif. Ketiga sekolah telah memenuhi aspek prosedural: ada rapat, ada proposal, ada bukti transaksi, ada laporan. Namun, keberadaan prosedur tidak serta-merta menjamin bahwa substansi akuntabilitas terpenuhi. Laporan yang disusun terlambat, anggaran yang direvisi tanpa dokumentasi yang memadai, atau laporan yang tidak dapat diakses publik adalah contoh kondisi di mana prosedur ada tetapi substansi akuntabilitas melemah.

Kedua, sistem digital yang digunakan, yaitu SAKTI, ARKAS, dan SIPLah, merupakan aset berharga yang hanya efektif apabila operator memiliki kompetensi yang memadai dalam penggunaannya. Investasi dalam sistem digital perlu diimbangi dengan pelatihan SDM yang berkelanjutan agar teknologi benar-benar berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sekadar kewajiban administratif yang diisi tanpa pemahaman mendalam. Ketiga, khusus untuk sekolah yang mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada pengurus OSIS seperti di SMAN 1 Bulukumba, perlu ada mekanisme pendampingan teknis yang terstruktur. Nilai pedagogis dari praktik ini tidak perlu dikorbankan, tetapi harus diimbangi dengan sistem supervisi yang memastikan laporan keuangan memenuhi standar akuntabilitas yang dipersyaratkan.

Keempat, transparansi akuntabilitas memerlukan akses informasi yang lebih terbuka. Keterbatasan aksesibilitas laporan keuangan di MAN 2 Bulukumba menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih eksplisit mengenai informasi mana yang dapat dan perlu dibuka kepada publik. Akuntabilitas horizontal yang diutamakan Mardiasmo (2018) hanya dapat terwujud apabila masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki akses yang cukup terhadap informasi pengelolaan dana sekolah. Penguatan akuntabilitas ke depan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga membangun budaya pertanggungjawaban yang genuine, di mana setiap pihak yang terlibat memahami makna dan tujuan dari setiap prosedur yang dijalankan.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian akuntansi sektor publik dan pendidikan dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana kegiatan OSIS tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi, ketepatan waktu, kualitas pertanggungjawaban, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi dan Mardiasmo, khususnya mengenai pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan OSIS, memperkuat pendampingan kepada pengurus OSIS, mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital, serta meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, temuan penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pelatihan pengelolaan dana sekolah guna mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan tiga sekolah di Kabupaten Bulukumba sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sekolah. Selain itu, pendekatan kualitatif menyebabkan hasil penelitian sangat bergantung pada informasi yang diperoleh melalui informan dan dokumen yang tersedia selama penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah sekolah dan wilayah penelitian yang lebih luas serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan OSIS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan akuntabilitas penggunaan dana sekolah dalam mendukung kegiatan OSIS pada MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan SMAN 1 Bulukumba secara umum telah mengikuti tahapan yang disyaratkan teori akuntabilitas Mahmudi dan Mardiasmo, mencakup perencanaan partisipatif, pelaksanaan



berbasis proposal, pencatatan digital yang disertai bukti transaksi, serta pelaporan berkala yang diperiksa pihak berwenang. Ketiga sekolah juga memanfaatkan sistem digital (SAKTI, ARKAS, SIPLah) sebagai instrumen transparansi dan tertib administrasi.

Kendati demikian, akuntabilitas yang berjalan secara prosedural belum sepenuhnya setara dengan akuntabilitas yang substantif. Tiga kendala utama yang berulang, yaitu keterlambatan pencairan dana, revisi anggaran yang tidak selalu terantisipasi, dan keterlambatan laporan pertanggungjawaban, mengindikasikan bahwa implementasi akuntabilitas masih menghadapi tantangan struktural dan kapasitas yang nyata. Penguatan kapasitas perencanaan, konsistensi penggunaan sistem digital, dan pendampingan dalam penyusunan laporan menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan agar akuntabilitas penggunaan dana kegiatan OSIS dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak sekolah perlu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan OSIS agar penggunaan dana lebih tepat sasaran, disertai dengan pencatatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang lebih tertib dan tepat waktu. Pembinaan kepada pengurus OSIS mengenai penyusunan proposal, pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban penggunaan dana juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat dukungan kepada sekolah melalui kebijakan yang mendorong ketepatan pencairan dana serta penyediaan pelatihan dan pendampingan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas lokasi dan objek penelitian serta mengkaji penerapan sistem digital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kegiatan OSIS.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak MAN 2 Bulukumba, SMKN 1 Bulukumba, dan SMAN 1 Bulukumba atas keterbukaan dan partisipasi seluruh informan dalam penelitian ini, serta kepada Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar atas dukungan akademik yang diberikan.

REFERENSI

- Azis, M., Tahir, T., Ramli, A., Sahade, Hasyim, S. H., Idris, H., Dunakhir, S., Dinar, M., Bado, B., Musa, M. I., & Tikollah, M. R. (2018). *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir* (1st ed.). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Candri, K., Mashuri, Rahmany, S., & Iswandi. (2024). Penerapan Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Ibu Harapan Bengkalis. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, 1(2).
- Dwangu, A. M., & Mahlangu, V. P. (2021). Accountability in the financial management practices of school principals. *International Journal of Educational Management*, 35(7), 1504–1524. <https://doi.org/10.1108/IJEM-06-2021-0243>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/TentangSAKUmum#gsc.tab=0>
- Innanawati, Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pada SMK Negeri 1 Mojosongo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 456–463. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.93>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280976/permendikbudristek-no-63-tahun-2023>
- Kramer, P., & Wibowo, U. B. (2024). School Operational Assistance Fund Management in Small Primary. *Journal of Educational Management Accountability*, 12(2). <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor Publik*. UII Press.
- Maama, H., Zungu, A., Oluka, A. M., & Marimuthu, F. (2023). An evaluation of the level of financial reporting compliance of public schools in Kwazulu-Natal. *REID (Research and Evaluation in Education)*, 9(2),



171–183. <https://doi.org/doi.org/10.21831/reid.v9i2.62605>

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). ANDI.

Maryanah, R., Syafe'i, A., & Permana, G. (2022). Optimalisasi Peran Osis Sebagai Strategi Peningkatan Prestasi Dan Pengembangan Program Di Sekolah Menengah Atas. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 277–294. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v1i3.219>

Matete, R. E. (2022). Heliyon Forms of decentralization and their implications for educational accountability in Tanzania. *Heliyon*, 8(February), e09436. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09436>

Pradana, M. D., Kristiyanti, L. M. S., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh Efektivitas , Akuntabilitas , Dan Transparansi Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Simo dan Bendosari). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 698–707. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.124>

Ramdhani, R. F. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp>

Septiyani, M., & Rumefti, U. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman Kecamatan Bangil). *Transparan*, 16(2), 48–60. <https://doi.org/10.53567/jtsyb.v16i2.77>

Tsharane, J., & Bussin, M. (2022). Exploring financial risk management practices in selected Tshwane schools. *South African Journal of Education*, 42(1), 1–9. <https://doi.org/doi.org/10.15700/saje.v42ns1a2123>
Exploring